

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks peraturan yang mengikat, memberikan hak suara kepada ASN dalam pemilu bisa menjadi dilema. Jika terdapat aturan yang ketat yang mengharuskan ASN untuk tetap netral dan jika pelanggaran terhadap netralitas dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, mungkin lebih bijaksana untuk mencabut penuh hak suara ASN. Namun, jika ASN mampu memahami dan memposisikan diri dengan bijak, serta menjalankan tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara dengan integritas dan netralitas, memberikan hak suara dalam pemilu mungkin tidak akan mengurangi profesionalisme mereka. Kesadaran dan integritas ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayan publik akan tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga keberhasilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada.

Netralitas memiliki peran dalam menjaga kinerja baik dari seorang ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu juga dimiliki oleh ASN, yaitu seperti hak kepribadian, hak milik, hak sosial, dan hak kebebasan berekspresi, sebagai representasi pondasi penting dalam terciptanya suatu konstitusi negara. Pentingnya hak politik dalam sebuah konteks demokrasi membuka peluang konflik yang muncul ketika ASN yang seharusnya menjalankan tugas dan kewajibannya dengan netral, namun juga memiliki

hak politik sebagai warga negara. Konflik ini menggambarkan dilema yang kompleks ketika ASN harus dapat memisahkan hasrat politik pribadi mereka dari tugasnya sebagai aparatur negara yang harus menjaga netralitas birokrasi.

5.2 Saran

Netralitas ASN adalah asas kunci yang harus dipegang teguh dalam upaya membentuk demokrasi yang profesional dan terhindar dari campur tangan politik yang dapat mengganggu pelayanan publik dan kebijakan sesuai dengan prinsip good governance. Meskipun ASN memiliki hak politik yang dijamin oleh konstitusi, aturan dan peraturan yang mengharuskan mereka menjaga netralitas selama masa jabatan mereka adalah bentuk upaya untuk menjaga integritas birokrasi.

